INDONESIAN TREASURY REVIEW
JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK

PENGARUH VARIABEL KEBUTUHAN FISKAL TERHADAP ALOKASI DAU PADA DAERAH BERCIRIKAN KEPULAUAN

Luthfia Maha Reni
Doddy Setiawan
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Alamat Korespondensi: anza.olivia@gmail.com

ABSTRACT
This study aims to examine the effect of the variable fiskal needs on the General Allocation Fund in island areas. The independent variables used were population index, spacious territory index, human development index, construction cost index, and GRDP. The research method used is multiple linear regression analysis, correlation test, and ANOVA test. The results of the study based on joint testing of each regional category show that in general, the fiskal needs variable influences the level of DAU revenue for each region. The division of regional categories that occur in the archipelago gives an impact on the significant value of GRDP variables. Population number, Human development index, Construction Expense Index have a positive influence on DAU. This indicates that the three fiskal variables can influence the level of DAU revenue received by the region. Meanwhile, the area-wide variable has a significant negative effect on DAU. This finding indicates that the negative significant value on this variable has not been able to influence the level of DAU acceptance. The GRDP variable indicates that the GRDP does not affect the level of DAU acceptance. The GRDP value of an area does not affect DAU revenue. These results are strengthened by different tests which show that each regional category has different DAU levels, categories 1 and 2 do not have differences but categories 1 and 3 and categories 2 and 3 have differences, this is because the islands have DAU differences. Regional GRDP results of 3 have different results from regions 1 and 2 which do not affect the DAU.

KATA KUNCI:
Kebutuhan Fiskal, Dana Alokasi Umum, Daerah Kepulauan

ABSTRAK
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji pengaruh variabel kebutuhan fiskal terhadap alokasi DAU pada daerah bercirikan kepulauan. Variabel independen yang digunakan adalah jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia, indeks kemahalan konstruksi, dan PDRB. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji korelasi, dan uji ANOVA. Hasil penelitian berdasarkan uji bersama tiap kategori wilayah menunjukan bahwa secara umum variabel kebutuhan fiskal berpengaruh terhadap tingkat penerimaan DAU untuk setiap daerah. Adapun pembagian kategori wilayah yang terjadi pada daerah kepulauan memberikan dampak pada nilai signifikansi variabel PDRB. Jumlah penduduk, Indeks pembangunan manusia, Indeks Kemahalan konstruksi memiliki pengaruh positif terhadap DAU. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketiga variabel fiskal tersebut mampu mempengaruhi tingkat penerimaan DAU yang diterima oleh daerah. Sementara itu variabel luas wilayah memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap DAU. Temuan ini mengindikasikan bahwa nilai siginifikan negative pada variabel tersebut belum mampu mempengaruhi tingkat penerimaan DAU. Variabel PDRB menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan DAU. Nilai PDRB suatu daerah tidak berpengaruh terhadap penerimaan DAU. Hasil tersebut diperkuat dengan uji beda yang menunjukan bahwa setiap kategori wilayah memiliki perbedaan tingkat DAU, kategori 1 dan 2 tidak memiliki perbedaan namun kategori 1 dan 3 serta kategori 2 dan 3 memiliki perbedaan, hal tersebut dikarenakan daerah kepulauan memiliki perbedaan DAU. Hasil PDRB wilayah 3 memiliki hasil berbeda dengan wilayah 1 dan 2 yaitu tidak berpengaruh terhadap DAU.

KLASIFIKASI JEL:
H53

CARA MENGUTIP:
Reni, L. M., & Setiawan, D. (2019). Pengaruh variabel kebutuhan fiskal terhadap alokasi dau pada daerah bercirikan kepulauan. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 4*(3), 285-303.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia Internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki sekitar 17.504 pulau, diantaranya seba6nyak 16.056 pulau yang mendapat pengakuan PBB. Luas wilayah Indonesia tercatat seluas ± 7.081.369 Km^2, terbagi atas daratan seluas 1.904.569 Km^2 dan lautan seluas 5.076.800 Km^2(BIG, 2018). Keputusan tentang Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan hasil konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 dan diberlakukan pada tahun 1994. Konvensi Hukum Laut merupakan hak dan tanggungjawab negara untuk mengelola lautan di dunia serta menetapkan kebijakan pengelolaan bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut (*UNCLOS*, 2010). Indonesia bergabung dengan perjanjian konvensi tersebut sejak 3 Februari 1986 dan diimplementasikan pada tahun 2000[1]. Payung hukum tentang kewilayahan lautan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hal tersebut merupakan tindak lanjut atas ratifikasi UNCLOS 2010. Kewenangan suatu daerah dalam pengelolaan laut dihitung dengan menggunakan prinsip *median line* yang dapat menentukan batas kewenangan antar daerah dalam pengelolaan potensi laut (Simatupang dan Khomsin, 2016). Dengan kewenangan seperti ini diharapkan seluruh wilayah kepulauan mendapatkan perhatian dari pemerintah yang berdampak pada peningkatan perekonomian bagi masyarakat wilayah pesisir kepulauan.

Peraturan yang berkaitan tentang perairan dan kelautan Indonesia dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, pasal 2 ayat (2) mendefinisikan perairan laut sebagai bagian integral dari wilayah daratan. Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa wilayah pemerintah daerah terdiri dari wilayah daratan dan lautan. Dalam pasal 18 ayat (1) UU Nomor 32 menyebutkan kewenangan pemerintah provinsi yang memiliki wilayah laut yaitu memperoleh kewenangan untuk mengelola sumber daya laut sepanjang 12 mil laut dari garis pantai, sedangkan untuk pemerintah kabupaten/kota memperoleh kewenangan sepanjang 4 mil laut. Berkaitan dengan hal tersebut UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 35 ayat (1) mendefinisikan luas wilayah bagi daerah kepulauan ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.

Tindak lanjut atas UU tersebut adalah dengan pengajuan RUU tentang daerah kepulauan oleh DPD RI, hal ini bertujuan untuk otonomi khusus daerah kepulauan dalam rangka penguatan NKRI. Dalam RUU tersebut, yang dimaksud dengan daerah kepulauan adalah provinsi kepulauan yang memiliki wilayah laut lebih luas dari pada wilayah daratan, yang mana di dalam wilayah tersebut terdapat pulau-pulau yang termasuk dalam bagian dari gugusan pulau, menjadi satu kesatuan secara geografi, ekonomi, politik, dan sosial budaya (Pasal 1 ayat (3) Bab I ketentuan Umum). Dilihat dari definisi tersebut secara administratif kewenangan atas laut menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi pasca pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini dapat diartikan pula bahwa pemerintah kabupaten/kota yang memiliki wilayah laut lebih luas daripada wilayah darat diluar provinsi kepulauan tidak termasuk sebagai daerah kepulauan, sebaliknya apabila wilayah kabupaten/kota memiliki wilayah darat lebih luas dalam gugusan pulau di provinsi kepulauan termasuk dalam daerah kepulauan. Secara umum daerah bercirikan kepualaun terdiri dari dua kategori utama berdasarkan topografi wilayahnya, yaitu tipe *Aquatic – Terrestrial* (wilayah laut lebih luas dari wilayah darat) dan tipe *Terrestrial – Aquatic* (wilayah darat lebih luas dari wilayah laut, tetapi masih dalam gugusan pulau)[2].

Permasalahan utama dalam pengembangan pembangunan daerah bercirikan kepulauan adalah terkait dengan akses dan ketersediaan infrastruktur, rendahnya sumber daya manusia serta masalah distribusi keuangan dan fiskal. Hal tersebut disebabkan oleh keadaan geografis wilayah, demografi masyarakat serta infrastruktur daerah yang dinilai kurang memadai. Selain itu, persoalan klasik tersebut muncul seiring dengan umur desentralisasi daerah, semakin lama umur desentralisasi maka semakin banyak pula permasalahan lama yang menumpuk dan tidak terselesaikan dengan baik (Adhamski, 2015). Untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah

[1] "Chronological lists of ratifications of ratifications of, accessions and successions to the Convention and the related Agreements". United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. January 8, 2010. Diakses tanggal 2019-04-08.

[2] Iqbal, Luthfi Muhammad, 2018. "Kebijakan Otonomi Khusus Daerah Kepulauan & Dana Khusus Kepulauan. Mengurangi, atau Memperlebar Kesenjangan?", https://medium.com diakses pada 23 Juli 2019

dengan dana perimbangan berdasarkan desentralisasi dan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa desentralisasi mampu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir kensenjangan antar masyarakat. Peraturan tersebut menegaskan bahwa sumber pendapatan daerah berasal dari PAD, dana perimbangan serta pendapatan lain yang sah.

Wujud kebijakan pelaksanan otonomi daerah adalah dengan transfer dana perimbangan yang bertujuan untuk meminimalisir kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah (Amril et.al, 2015). Dana perimbangan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dan tercatat sebesar 73% dari total pendapatan daerah[3], ditunjukkan pada diagram dibawah ini:

Grafik 1: Pendapatan Daerah
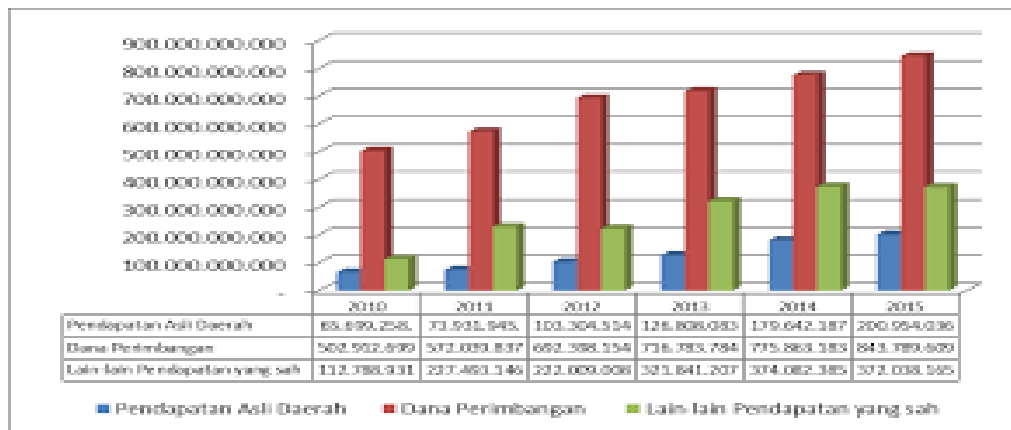
Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI (2016)

Grafik di atas menunjukkan bahwa PAD hanya memberikan kontribusi lebih kecil daripada dana perimbangan ataupun pendapatan lain yang sah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah bergantung pada dana perimbangan dari pada pendapatan asli daerahnya (Inayati & Setiawan, 2017). Pendapat lain tentang peran dana perimbangan oleh Silver, Azis & Schroeder (2010) berpendapat bahwa dana perimbangan dapat mengatasi semua kebutuhan daerah sehingga dapat memacu daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Dana perimbangan sangat penting bagi pemda, terumata Dana Alokasi Umum (DAU). DAU menyumbang 70% pembiayaan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah, dengan memberikan kontribusi sebesar 12% - 15% angka PAD rata-rata secara nasional[4]. Alokasi DAU sangat dipengaruhi oleh kebutuhan fiskal karena DAU dianggap dapat memenuhi uji transparansi serta kebermanfaatannya dalam memenuhi kebutuhan daerah (Silver et.al, 2010). Sebuah studi tentang formulasi alokasi DAU untuk memenuhi kriteria normatif UU No. 25/1999, menemukan bahwa alokasi DAU berdasarkan IPM menghasilkan tingkat pemerataan fiskal yang lebih baik, terutama pada Kabupaten/kota (Hamid, 2003). Selanjutnya Azwardi (2006) mengemukakan bahwa hanya variabel penduduk dan pengeluaran pemerintah yang memiliki pengaruh positif dalam formulasi alokasi DAU. Pendapat berbeda datang dari Ong (2012) yang meneliti tentang dampak formula DAU bagi daerah bercirikan kepulauan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa beberapa formulasi DAU belum menunjukkan signifikansi dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah penduduk dan luas wilayah, sedangkan variabel IPM dalam kebutuhan fiskal memiliki signifikansi positif terhadap alokasi DAU terutama pada daerah bercirikan kepulauan. Hudspet dkk (2015) berpendapat bahwa variabel

[3] Artikel Ditjen Keuangan Daerah, Dana Perimbangan, sumber Pendapatan Daerah Terbesar (diakses 13 Agustus 2018), http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/24-dana-perimbangan--sumber-pendapatan-daerah-terbesar

[4] Berita Koran Jakarta, Ahan Syahrul Arifin. 23/1/2018, Pemerataan Pemabngunan, http://www.koran-jakarta.com/pemerataan-pembangunan/

dalam formulasi pembentuk DAU dapat berkontribusi pada penurunan dan peningkatan total penerimaan dan pengeluaran DAU yang merupakan ukuran valid bentuk transparansi fiskal. Adanya perubahan bobot luas wilayah laut bagi daerah kepulauan dalam formulasi perhitungan DAU dianggap dapat meningkatkan penerimaan daerah (Ong, 2012).

Keterbatasan dari penelitian sebelumnya yaitu daerah kepulauan yang digunakan dalam penelitian masih sedikit dan belum dapat menggambarkan daerah bercirikan kepulauan. Berdasarkan hasil penelitian Hamid (2003), Azwardi (2006), Ong (2012) maupun Hudspesth (2015) mengangkat isu kurangnya jumlah data sekunder tentang ciri daerah kepulauan. Hal ini mengacu pada daerah kepulauan yang memiliki jumlah kabupaten/kota dan termasuk dalam Daerah Otonomi Baru. Selain itu, kelemahan penelitian terdahulu tidak menjelaskan model penelitian yang digunakan secara terperinci. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu untuk melihat faktor yang mempengaruhi DAU bercirikan kepulauan, sehingga penelitian ini membahas lebih detail seberapa besar kebutuhan fiskal dapat mempengaruhi alokasi DAU pada daerah bercirikan kepulauan yang terbagi dalam beberapa kategori.

Penelitian ini difokuskan pada kebutuhan fiskal daerah bercirikan kepulauan tentang keberadaan variabel luas wilayah yang terbagi atas wilayah perairan dan daratan. Sedangkan, konsentrasi penelitian terletak pada sampel penelitian yang merupakan daerah bercirikan kepulauan yang terdapat di Indonesia, dengan pembanding antara luas daratan dan luas lautan daerah kepulauan. Selain itu, model penelitian ini mengacu pada formulasi kebutuhan fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. UU tersebut telah mengatur pelimpahan kewenangan belanja urusan dari kabupaten/kota ke provinsi. Model penelitian yang digunakan pada penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis lebih mengenai faktor yang mempengaruhi DAU pada daerah bercirikan kepulauan karena studi ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu menambah pengujian korelasi tiap variabel dan uji beda yang akan memberikan kontribusi penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi DAU pada daerah bercirikan kepuluan.

Atas dasar keterbatasan pada penelitian sebelumnya, perlu adanya penelitian yang mengamati pengaruh variabel kebutuhan fiskal terhadap alokasi DAU terutama pada daerah bercirikan kepulauan. Maka, alasan utama penelitian ini adalah mengkaji bobot masing-masing kebutuhan fiskal, terutama variabel luas wilayah bagi daerah yang memiliki wilayah perairan yang lebih luas daripada daratan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan pengaruh variabel kebutuhan fiskal pada alokasi DAU bagi daerah bercirikan kepulauan. Variabel penelitian yang digunakan merupakan komponen variabel kebutuhan fiskal sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah daerah bercirikan kepulauan sebagai pertimbangan dalam mengalokasikan DAU. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemerintah dalam mengkaji jumlah penduduk, luas wilayah, IPM, IKK, dan PDRB terhadap pengalokasian DAU Hal ini sangat penting karena maraknya fenomena *flypaper* akibat DAU yang kurang tepat dalam pengalokasianya.

1.1.1. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan berdasarkan pemikiran peneliti ataupun diturunkan dari teori yang telah ada (Kerlinger, 2006:03). Secara umum Swan & Martin (1994) mengemukakan bahwa pengembangan hipotesis dapat dilakukan dengan tiga tahap. Pertama, prediksi literatur teoritis maupun pendapat peneliti sebelumnya terkait dengan topik penelitian serta prediksi uji empiris penelitian. Kedua, mengamati keseluruhan variabel serta proses prediksi teoritis untuk menentukan proporsi tertentu dalam penelitian. Ketiga, menentukan hipotesis berdasarkan dua tahap sebelumnya yang dapat diuji secara logis dengan menghubungkan antara teori dan pengamatan empiris. Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini mengacu pada kerangka teori tersebut, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Teori dan prediksi
    - Hamid (2003) dalam penelitian tentang formula alternatif DAU dengan melakukan analasis pendekatan kesenjangan fiskal karena pendekatan tersebut dianggap sesuai keadaan di daerah dengan memperhitungkan kebutuhan dan kapasitas daerah. Penelitian tersebut merumuskan model alokasi dengan menggunakan variabel yang secara langsung dan tidak langsung membentuk pembangunan manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang telah dibuktikan memiliki nilai positif antara lain:

- Pergeseran alokasi ke kabupaten/kota di luar jawa; alokasi DAU tertinggi terdapat pada daerah di pulau jawa, hal tersebut mengindikasikan bahwa daerah di luar pulau Jawa rata-rata memiliki tingkat pembangunan manusia yang rendah, oleh karena itu daerah di luar pulau Jawa selayaknya mendapatkan perhatian lebih dalam pengalokasian DAU. Hal ini mengakibatkan pergeseran variabel jumlah penduduk dalam formulasi DAU;
- Bobot kebutuhan dan kapasitas fiskal yang menunjukkan tingkat bobot masing-masing koefisien kebutuhan dan kapasitas fiskal. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara formulasi DAU sebelumnya dengan formulasi DAU yang ditawarkan. Perbedaaan tersebut terletak pada penambahan variabel IPM.
- Indikator pemerataan provinsi yang menunjukkan perhitungan yang sangat tinggi, fokus pelaksanaan otonomi daerah terdapat di kabupaten/kota sehingga alokasi DAU terbesar terdapat di kabupaten/kota.

Indeks jumlah penduduk dan indeks pembangunan manusia merupakan faktor utama dalam penyediaan kebutuhan layanan publik bagi masyarakat. Hasil penelitian Hamid (2003) menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif terhadap alokasi DAU. Pengaruh kebutuhan fiskal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap alokasi DAU di daerah.

- Penelitian yang dilakukan oleh Azwardi (2006) terkait dengan pengaruh kebutuhan fiskal terhadap alokasi DAU menyatakan bahwa vaiabel kebutuhan fiskal yang terdiri dari luas wilayah, indeks pembangunan manusia dan indeks kemahalan konstruksi secara bersama-sama berpengaruh terhadap alokasi DAU.
- Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ong (2012) menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dalam hipotesa penelitian berpengaruh signifikan positif, akan tetapi hasil penelitian terjadi multikoloinieritas sehingga kesimpulan hipotesa tidak dapat diambil. Variabel luas wilayah menunjukkan trend maksimal dengan penambahan bobot indeks luas lautan mencapai 80% dari total luas laut, akan tetapi hal tersebut tidak menambah pemerataan kondisi keuangan daerah. Kondisi yang sama terjadi pula pada luas daratan daerah bercirikan kepulauan. Selanjutnya variabel indeks pembangunan manusia sebagai proksi kualitas pembangunan manusia belum berperan signifikan terhadap alokasi DAU dan pembangunan daerah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan PDRB yang terjadi setiap tahunnya berpengaruh terhadap penerimaan dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh, hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa PDRB per kapita memiliki pengaruh positif terhadap alokasi DAU.
- Tingkat harga lokal mempengaruhi pada efek hibah bagi daerah (Allers & Vermulen, 2016). Selanjutnya kesenjangan pendapatan antar daerah berdampak pada pengalihan sumber daya daerah, sehingga memberikan efek merugikan yang lebih besar terutama bagi daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rendah (Jianghuai dan Bu, 2014).
- PDRB merupakan tolok ukur dalam menentukan nilai atas barang jasa unit ekonomi yang dapat berpengaruh pada analisis kemiskinan suatu daerah atau wilayah. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa PDRB per kapita memiliki pengaruh positif terhadap alokasi DAU. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa PDRB per kapita merupakan indikator kondisi ekonomi daerah sebagai efek pengganti sumber dana dan bertujuan untuk mempertahankan tingkat pengeluaran daerah yang dapat mempengaruhi penerimaan dana transfer pemerintah (Lim, Sanghoon & Kim, 2017). Penelitian serupa di Nigeria menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh terhadap seluruh pengeluaran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi (Bbatunde 2018).

2. Pengaturan dan proporsi
   - Indeks jumlah penduduk merupakan faktor utama dalam penyediaan kebutuhan layanan publik bagi masyarakat.
   - Indeks luas wilayah dalam alokasi DAU merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk menentukan ketersediaan sarana dan prasarana suatu wilayah.
   - Perhitungan terkait indeks pembangunan manusia dalam formulasi DAU bertujuan menunjukkan variabel tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk yang mendapatkan layanan dasar berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Pendekatan kesenjangan fiskal secara

langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat pembangunan manusia

- Pencapaian tingkat kesejahteraan dapat diukur dengan indeks kemahalan konstruksi yang ditentukan dengan perhitungan terhadap tingkat kesulitan geografis daerah berdasarkan harga relatif prasarana konstruksi tiap daerah.
- PDRB sebagai nilai tambah atas unit usaha yang dijalankan oleh pemerintah di suatu wilayah atau jumlah dari keseluruhan nilai barang dan jasa yang merupakan satu kesatuan dalam unit ekonomi suatu wilayah.

3. Hipotesis dan pengukuran

Perumusan hipotesis dalam penelitian sebelumnya menggunakaan perhitungan secara ekonometrik terhadap kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal untuk memperoleh koefisien masing-masing variabel. Sampel penelitian adalah seluruh provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan manusia memiliki peringkat tertinggi dalam formulasi alokasi DAU untuk daerah. Selain itu, metode penelitian yang digunakan adalah *hypothesis testing* dengan obyek penelitian mengenai dana transfer yang diterima oleh pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2002. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji F kebutuhan fiskal termasuk luas wilayah secara bersama-sama mempengaruhi alokasi DAU bagi daerah. Selain itu penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa setiap pergeseran variabel kebutuhan fiskal dapat mempengaruhi alokasi DAU. Berdasarkan prediksi dan proporsi pengembangan hipotesis, maka dapat disimpulkan beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1	:	Jumlah penduduk berpengaruh terhadap alokasi DAU pada provinsi bercirikan kepulauan
H2	:	Luas wilayah berpengaruh signifikan negatif terhadap alokasi DAU pada provinsi bercirikan kepulauan
H3	:	IPM berpengaruh positif terhadap alokasi DAU pada provinsi bercirikan kepulauan
H4	:	IKK berpengaruh signifikan positif terhadap alokasi DAU pada provinsi bercirikan kepulauan
H5	:	PDRB per kapita berpengaruh terhadap alokasi DAU pada provinsi bercirikan kepulauan

Pengujian terhadap beberapa hipotesa di atas dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh variabel kebutuhan fiskal terhadap alokasi DAU terutama pada daerah bercirikan kepulauan.

1.1.2. Desain Penelitian

Sekaran (2013: 94-96) mendefinisikan desain penelitian (*research design*) adalah sebagai berikut:

"Issues relating to decisions regarding the purpose of study (exploratory, descriptive, hypothesis testing), its location (the study setting), the type it should conform to (type of investigation), the extent to which it is manipulated and controlled by the researcher (extent of researcher interference), its temporal aspects (time horizon), and the level at which the data will be analyzed (unit of analysis)."

Penelitian ini merupakan penelitian *hypotesis testing* yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran hasil penelitian terdahulu (Arikunto, 2006:8). Selain itu, penelitian ini menggunakan penelitian korelasional untuk mendeteksi keterkaitan antar variabel yang didasarkan atas koefisien korelasi (Suryabrata, 2000:24), tujuan desain penelitian korelasional adalah untuk menguji hipotesis penelitian, populasi penelitian adalah kabupaten/kota bercirikan kepulauan di Indonesia, dengan sampel penelitian sebanyak 399 kabupaten/kota, dengan selama 5 tahun anggaran antara tahun 2012 – 2016.

2. TINJAUAN TEORITIS

Seiring perkembangan reformasi saat ini serta perubahan pola pikir dan kehidupan masyarakat, berdampak pada tata kelola pemerintahan Indonesia. Tuntutan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan terarah diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang bersifat desentaralisasi. Sistem desentralisasi dapat diasumsikan sebagai jalan untuk memperkuat demokrasi yaitu dengan pengaturan kebijakan oleh pemerintah pusat dan memberikan kewenangan terhadap pengambilan keputusan kepada pemerintah daerah (Osborne dan Gabler, 1992). Perwujudan dari sistem pemerintahan desentralisasi adalah otonomi daerah yang artinya seluruh kewenangan yang terdapat di daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dengan memanfaatkan kekayaan yang ada di

daerah untuk kesejahteraan masyarakat (UU Nomor 32 Tahun 2004). Otonomi daerah dianggap berhasil apabila daerah mampu mengelola pendanaan daerah melalui dana perimbangan antara pusat dan daerah untuk tujuan peningkatan layanan kepada masyarakat (Morothia, 2010).

Sebagai wujud dari desentralisasi dan otonomi daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, dalam pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa dana perimabangan dikategorikan mejadi tiga yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU merupakan sumber yang sangat penting dalam penerimaan daerah, perkembangan penerimaan DAU selama kurun waktu lima tahun terakhir ditunjukkan dalam diagram dibawah ini:

Grafik 2. Perkembangan Dana Perimbangan
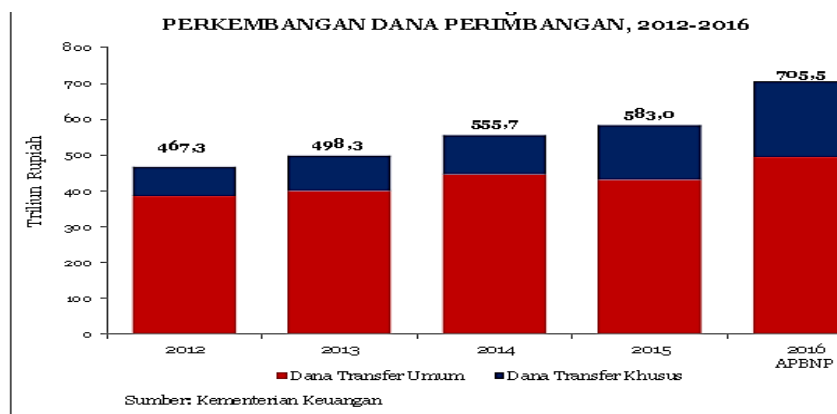
Dalam grafik di atas menggambarkan bahwa DAU mendominasi dana perimbangan daripada DAK. Hal tersebut berarti bahwa DAU memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penerimaan daerah. Berdasarkan kedua grafik tersebut menunjukkan bahwa terdapat fenomena ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat yang mengakibatkan anggaran transfer semakin meningkat setiap tahun (Haryanto, 2014). Ketergantungan pemerintah kepada pemerintah pusat mengakibatkan kemandirian daerah berkurang karena daerah tidak mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penghasil pendapatan asli daerah (Inayati dan Setyawan, 2017). Hasil penelitian di negara Korea juga menyebutkan bahwa ketergantungan keuangan lokal pada subsidi nasional, mengakibatkan perubahan drastis pada skema subsidi nasional saat ini, sehingga dapat menimbulkan beban tambahan pada keuangan lokal (Lim dan Kim, 2017).

Perhitungan DAU secara umum sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 hanya memperhitungkan luas daratan dan jumlah penduduk yang dirasa tidak adil bagi daerah bercirikan kepulauan. Tuntutan utama daerah bericirikan kepualauan adalah untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan kondisi wilayahnya. Seiring perkembangan tuntutan pemerintah daerah bercirikan kepulauan tersebut, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004. Penjelasan pasal 35 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa luas wilayah daerah bercirikan kepulauan ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan. Pengelompokan pulau atau kepulauan dihitung dengan menjumlahkan rata-rata daerah provinsi dalam satu gugusan pulau dan luas daerah provinsi terkecil dalam satu gugusan pulau dibagi dua. Selain itu dalam draft rancangan pengganti UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 15 membagi kewenangan wilayah laut pada DBH yang bersumber dari pajak (bumi dan bangunan sektor pertambangan) dari wilayah laut menjadi kewenangan kabupaten/kota (ayat (1)), kewenangan provinsi (ayat (2)) dan kewenangan pemerintah pusat (pasal (3)).

DJPK Kemenkeu RI (2018)[5] membagi daerah kepulauan berdasarkan tipologi wilayah terdiri dari tiga kategori, yaitu:

a. Kategori I, merupakan daerah kepulauan berdasarkan berdasarkan topografi wilayah kepulauan dimana luas wilayah laut lebih luas daripada wilayah darat atau bertipe *aquatic - terrestrial* dan keanggotan Badan Kerja Sama Daerah Kepualauan (BKSDK), terdiri dari Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara.
b. Kategori II, merupakan daerah kepulauan berdasarkan topografi wilayah kepulauan dimana luas wilayah laut lebih luas daripada wilayah darat atau bertipe *aquatic - terrestrial* Non – BKSDK, terdiri dari: Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.
c. Kategori III, merupakan daerah kepulauan berdasarkan topografi wilayah kepulauan di mana daerah kabupaten/kota memiliki luas daratan lebih luas dibandingkan dengan luas laut, tetapi masuk dalam gugusan pulau atau bertipe *terrestrial - aquatic*, terdiri dari: Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua.

DAU dialokasikan berdasarkan pada variabel pembentuk DAU yaitu Alokasi Dasar (AD) ditambah dengan Celah Fiskal (CF). AD ditentukan oleh besaran gaji PNS daerah, sedangkan CF ditentukan oleh selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Komponen utama DAU bagi daerah yang patut untuk diperhitungkan adalah komponen kebutuhan fiskal. Kebutuhan fiskal merupakan kebutuhan daerah yang terdiri dari jumlah penduduk (JP), luas wilayah (LW), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), serta Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dihitung dalam bentuk bobot indeks (pasal 32 ayat (4) draft rancangan pengganti UU Nomor 33 tahun 2004). Alokasi DAU tersebut digunakan untuk pembiayaan kebutuhan belanja pemerintah daerah. Beberapa penelitian tentang variabel kebutuhan fiskal antara lain adalah Aaberge dan Langørgen (1997) mengatakan bahwa peningkatan layanan terhadap penduduk serta peningkatan infrastruktur berpengaruh terhadap penerimaaan transfer dana pemerintah lokal. Sedangkan Hamid (2003) dalam penelitiannya yang berkaitan dengan alternatif formula DAU mengatakan bahwa IPM menunjukkan signifikansi tinggi terhadap alokasi DAU, dan diikuti oleh variabel kebutuhan fiskal yang lain.

Hasil penelitian tersebut senada dengan penelitian Azwardi (2006) tentang pengaruh kebutuhan fiskal terhadap alokasi DAU yang menyatakan bahwa berdasarkan uji F keseluruhan variabel kebutuhan fiskal secara bersama-sama berpengaruh terhadap DAU yang diterima Provinsi. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Rokhim (2017) yang menyiratkan bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi regional dapat dikur dengan tingkat IPM daerah. Cahyaning (2018) berpendapat bahwa dengan PDRB sebagi variabel modersi tidak dapat mempengaruhi hubungan antara DAU dan belanja modal, hal ini dapat diartikan bahwa PDRB tidak berpengaruh pada DAU.

Hasil penelitian Cahyaning (2018) tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2012) yang membahas tentang PDRB berpengaruh signifikan terhadap alokasi DAU tetapi memiliki hubungan yang negatif terhadap belanja daerah. Selain itu hasil penelitian lain tentang variabel kebutuhan fiskal terhadap alokasi DAU oleh Azwardi (2006) yang menyebutkan komponen kebutuhan fiskal terdiri dari jumlah penduduk, kepadatan penduduk, jumlah penduduk miskin, indeks harga bangunan dan pengeluaran pemerintah. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ong (2012) yang membagi komponen kebutuhan fiskal berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, IPM, IKK, dan PDRB perkapita merupakan penelitian yang dilakukan setelah adanya perubahan formulasi DAU.

2.1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari dana perimbangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dan dialokasikan tanpa syarat dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah pusat maupun antar pemerintah daerah (UU Nomor 25 tahun 1999). Secara umum para ahli menyebutkan bahwa DAU merupakan proses transfer dana secara umum yang

[5] http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=7273, Departemen Kueangan Republik Indonesia, provinsi berdasarkan Luas Wilayah, Tipologi dan Keanggotaan BKSDK

diberikan kepada daerah dan digunakan untuk proses pemerataan fiskal antar daerah (Halim, 2002:160 dan Bastian, 2003:84). Mekanisme penerapan alokasi DAU telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 27ayat 1 yang menyatakan bahwa jumlah keseluruhan total DAU secara nasional ditetapkan sebesar 26% dari total pendapatan dalam negeri yang terdapat dalam APBN. Alokasi DAU untuk masing-masing daerah ditetapkan sebesar 10% bagi provinsi dan 90% bagi kabupaten/kota.

Alokasi yang ditujukan untuk daerah telah sesuai dengan tujuan utama dari DAU karena dana yang diberikan diperuntukkan untuk pembangunan dan pemerataan di daerah seperti pemenuhan kebutuhan infrastrktur (Saputra, et all, 2013). Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 mengatur tentang sistem pengalokasian keuangan dana perimbangan yang menjadi porsi bagi pusat dan daerah dalam kaitan dengan hubungan fiskal dapat terstruktur dengan baik yang bertujuan untuk pembiayaan pembangunan dan sebagai stabiltas anggaran daerah. Hal tersebut berarti DAU digunakan sebagai alat fiskal kontra siklis serta meningkatkan surplus sebagai pendorong pengeluaran aktual dan pengurangan pajak ataupun pengembalian pajak dari wajib pajak (Hou, 2003). DAU dapat digunakan untuk mengatasi semua kebutuhan lokal di daerah yang sebelumnya dibiayai oleh dana inpres dan subsidi daerah otonom, sehingga dapat memacu daerah dalam peningkatan penerimaan yang lebih baik (Silver et.al, 2010).

2.2. Kebutuhan Fiskal

Kebutuhan fiskal merupakan kebutuhan mendanai anggaran belanja negara. Kebutuhan fiskal terdiri atas jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyatakan bahwa pengalihan kewenangan urusan pemerintahan sebagai langkah dalam pengendalian belanja antara pemerintah pusat dan daerah. Adanya korelasi antara PAD dan transfer fiskal dapat meningkatkan total pendapatan daerah yang berakibat paa peningkatan belanja daerah (Vegh dan Vulletin, 2011). Perbedaan dalam penentuan bobot alokasi dasar dan variabel celah fiskal perhitungan DAU dapat dilihat dengan bobot perhitungan DAU tahun 2016 dan 2017 di bawah ini:

	2016		2017	
	Prov	Kab/Kota	Prov	Kab/Kota
	10%	90%	10%	90%
BOBOT ALOKASI DASAR	40%	49%	40%	45%
BOBOT CELAH FISKAL	60%	51%	60%	55%
Variabel Kebutuhan Fiskal				
Indeks Penduduk	30%	30%	30%	30%
Indeks Wilayah	15%	13%	15%	13%
*Perlakuan Luas Laut	40%	45%	45%	50%
Indeks IKK	27%	28%	27%	28%
Indeks IPM	17%	17%	17%	17%
Indeks PDRB/cap	11%	12%	11%	12%
Variabel Kapasitas Fiskal				
PAD	70%	60%	70%	60%
DBH Pajak	75%	60%	75%	60%
DBH SDA	85%	80%	85%	80%

Peningkatan bobot dalam indeks kebutuhan fiskal dapat meningkatkan penerimaan dana perimbangan bagi daerah (Ong, 2012). Selain itu, penentuan bobot dalam variabel kebutuhan fiskal telah memperhitungkan perlakuan luas wilayah laut bagi daerah yang memiliki wilayah laut lebih luas daripada wilayah daratan. Penentuan bobot variabel tersebut telah disesuaikan dan ditetapkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, sehingga dapat mengakomodir pemerataan pembangunan di daerah.

2.3. Kebijakan Desentralisasi Fiskal

Kebijakan desentralisasi fiskal erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari adanya pelimpahan kewenangan

fiskal dari pemerintah pusat[6]. Secara umum kebijakan desentralisasi fiskal merupakan penetapan pembatasan pengambilan keputusan dan tanggung jawab tingkat daerah dalam pemberian layanan publik yang berdampak pada keuangan daerah (Niznansky, 1998). Fungsi utama desentralisasi fiskal daerah adalah pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat[7]. Data Ditjen Otda menyebutkan bahwa hasil evaluasi Kemendagri yang mengatakan bahwa kebutuhan dan perekonomian di pemerintah daerah bergantung sepenuhnya pada APBN yakni sebesar 90% dan hanya memanfaatkan PAD sebesar 10%[8]. Hal ini menunjukkan bahwa adanya skema transfer dalam APBN dapat mengakibatkan distorsi dalam pemanfaatan dan kebijakan fiskal di daerah (Baskaran, 2016). Selanjutnya penelitian di Albania menunjukkan bahwa desentralisasi fungsi pemerintahan belum sesuai harapan, hal tersebut dikarenakan hampir 90% pendapatan pemerintah di Albania masih berasal dari transfer pemerintah pusat (Guga, 2018).

Alegre (2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa desentralisasi fiskal berfokus pada otonomi fiskal yang dialokasikan pada tingkat berbeda untuk tiap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sehingga tujuan umum dari transfer dana perimbangan berdampak pada penentuan kebijakan fiskal di daerah (Baskaran, 2016). Penelitian oleh Lim, Sanghoon dan Kim (2017) juga mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal memungkinkan adanya restrukturisasi transfer fiskal secara keseluruhan yang menyebabkan ketergantungan daerah pada subsidi nasional dan berakibat pada bertambahnya beban keuangan daerah. Selain itu desentralisasi berkaitan erat dengan kebijakan pajak dan moneter yang merupakan faktor utama perhitungan inflasi dalam makroekonomi. Penelitian di Spanyol menyebutkan bahwa otonomi daerah memberikan peran besar dalam otonomi fiskal dimana desentralisasi fiskal berfokus pada otonomi perpajakan yang lebih besar tanpa mempengaruhi redistribusi pendapatan regional suatu daerah (Alegre, 2014). Pendapat lain mengemukakan bahwa mekanisme kebijakan fiskal menunjukkan hasil yang lebih kompatibel terhadap perubahan pembelanjaan maupun pajak dalam pertumbuhan ekonomi makro terutama pada era otonomi daerah (Coreia, 2016).

Efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal digunakan untuk menyeimbangkan antara transfer dana bantuan pemerintah dan pengeluaran pemerintah daerah (Kirchnera dan Wijnbergenb (2016) dan Chan (2018)). Sedangkan Cho (2018) dalam penelitiannya berpendapat bahwa desentralisasi fiskal di Korea, mengindikasikan transfer dana perimbangan berkontribusi untuk mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal antara pemerintah daerah. Konsekuensi dari rendahnya kemandirian fiskal dianggap dapat mengurangi keefektifan desentralisasi bidang politik dan administrasi dalam sistem otonomi daerah, yang berarti bahwa desentralisasi politik dan administrasi tidak akan berlanjut kecuali dengan adanya peningkatan desentralisasi keuangan (Koo dan Kim, 2018).

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dan korelasional. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian dengan pengumpulan data yang menggambarkan fenomena maupun hubungan antar variabel bebas berdasarkan individu, kondisi, maupun situasi yang ada (Sekaran, 2013:97). Sedangkan penelitian korelasional merupakan penelitian untuk menentukan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan tingkat korelasi yang terjadi antar variabel dalam penelitian Frankel dan Wallen (2008:328). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear data panel untuk mengetahui pengaruh tiap variabel, uji korelasi untuk melihat tingkat korelasi antar variabel, dan uji *one way* ANOVA untuk melihat perbedaan DAU antar wilayah. Regresi linear data panel yang digunakan merupakan gabungan data cross section dan time series menggunakan program *eviews* 9.

3.2. Populasi, Sampel, Data dan pengumpulan data

[6] UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 2014

[7] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160913004402-84-157786/menyoal-desentralisasi-fiskal-dan-imbas-pemekaran-daerah

[8] http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/07/mantan-dirjen-otda-80-persen-pemekaran-daerah-gagal

Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota bercirikan kepulauan. Sampel penelitian sebanyak 399 kabupaten/kota yang terbagi atas tiga kategori sebagai berikut:

- Kategori I (*Aquatic – Terrsetrial dan* BKSDK) sebanyak 99 kabupaten/kota;
- Kategori II (*Aquatic – Terrsetrial dan Non* BKSDK) sebanyak 117 kabupaten/kota;
- Kategori III (*Terrsetrial – Aquatic*) sebanyak 183 kabupaten/kota.

Teknik sampling yang digunakan menggunakan *purposive sampling*. Kriteria sampel dalam penelitian adalah kabupaten/kota daerah kepulauan yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama periode penelitian sesuai dengan data yang dibutuhkan peneliti, sehingga data yang dianggap memenuhi kriteria sampel penelitian sebanyak 381 kabupaten/kota.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah dan data kebutuhan fiskal kabupaten/kota di Indonesia antara tahun 2012 – 2016 yang diterbitkan melalui *website* instansi terkait diantaranya:

No.	Jenis Data	Tahun	Sumber
1.	APBN	2008-2017	Kementerian Keuangan RI
2.	APBD Provinsi, Kabupaten/Kota	2008-2017	Kementerian Keuangan RI
3.	PDRB Per Kapita Provinsi, Kabupaten/kota	2008-2017	BPS RI dan Kemendagri
4.	DAU Provinsi, Kabupaten/kota	2008-2017	Kementerian Keuangan RI
5.	Penduduk Provnsi, Kabupaten/kota	2008-2017	Badan Pusat Statistik RI
6.	Luas Wilayah Provinsi, Kabupaten/kota	2008-2017	Kemendagri, BPS RI dan BIG RI (Badan Informasi Geospasial)
7.	IKK	2008-2017	BPS RI
8.	IPM	2008-2017	BPS RI
9.	TBR	2008-2017	Daerah dan Kementerian Keuangan RI

3.3. Pengukuran dan Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari alokasi pendapatan APBN ke daerah untuk pemerataan keuangan daerah. Dana Alokasi Umum dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$DAU = AD + CF$$

Keterangan:
DAU : Dana Alokasi Umum
AD : Anggaran dasar
CF : Celah Fiskal

3.3.2. Variabel Independen

Variabel independent dalam penelitian terdiri atas lima variabel independen yaitu:

3.3.2.1 Indeks Jumlah Penduduk (JP)

Definisi jumlah penduduk menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai variabel kebutuhan penyediaan layanan publik terhadap masyarakat di suatu daerah. Perhitungan indeks jumlah penduduk didasarkan pada jumlah penduduk suatu wilayah dibagi dengan rata-rata jumlah penduduk secara nasional.

3.3.2.2 Indeks Luas Wilayah (LW)

Pengertian luas wilayah menurut Peraturan Pemerintah Nomo 47 Tahun 1997 adalah kesatuan wilayah geografis suatu daerah yang meliputi tanah air dan udara, dibatasi oleh kenampakan daerah berdasarkan ketentuan aspek admisitratif dan fungsional. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (2) tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah mendefinisikan luas wilayah sebagai varibel yang digunakan untuk menentukan ketersediaan sarana dan prasarana suatu wilayah. Indek luas wilayah dalam perhitungan DAU dihitung berdasarkan luas wilayah dibagi dengan rata-rata luas wilayah secara nasional.

3.3.2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan perhitungan berdasarkan angka harapan hidup, angka melek huruf, pendidikan serta standar hidup layak dari seluruh negara di dunia (BPS dan UNDP, 1997). Arsyad (1999) mengatakan bahwa UNDP melakukan pengukuran IPM dengan menggunakan rata-rata pencapaian negara yang berpatokan pada tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Perhitungan terkait indeks pembangunan manusia dalam formulasi DAU bertujuan untuk menunjukkan variabel tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk yang mendapatkan layanan dasar berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Perhitungan tersebut mengikuti perhitungan statistik yang dikelurakan oleh Badan Pusat Statistik RI.

3.3.2.4. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Pencapaian tingkat kesejahteraan dapat diukur dengan indeks kemahalan konstruksi yang ditentukan dengan perhitungan terhadap tingkat kesulitan geografis daerah berdasarkan harga relatif prasarana konstruksi tiap daerah. Perhitungan IKK tiap daerah digambarkan dengan perbandingan tingkat harga barang konstruksi daerah dengan rata-rata tingkat harga konstruksi secara nasional.

3.3.2.5. PDRB per Kapita

BPS mendefinisikan PDRB sebagai nilai tambah atas unit usaha yang dijalankan oleh pemerintah di suatu wilayah atau jumlah dari keselurhan nilai barang dan jasa yang merupakan satu kesatuan dalam unit ekonomi suatu wilayah. Atau dapat pula dikatakan bahwa PDRB merupakan tolok ukur dalam menentukan nilai atas barang jasa unit ekonomi yang dapat berpengaruh pada analisis kemiskinan suatu daerah atau wilayah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada peningkatan angka PDRB merupakan perubahan yang terjadi pada komponen yang berhubungan dengan PDRB antara lain adalah tingkat pertumbuhan penduduk serta perubahan struktur ekonomi daerah (Arsyad, 1999). Fokus pembangunan daerah terletak pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing daerah yang dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi berdasarkan pertumbuhan angka dalam PDRB (Kuncoro, 2010). PDRB per kapita dalam perhitungan DAU bertujuan untuk mengetahui potensi serta aktivitas perekonomian daerah. Perhitungan tersebut didasarkan atas total *output* seluruh produksi kotor tiap daerah.

3.4. Teknik Analisis Data

3.4.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai penyajian data yang digunakan berupa nilai *mean, maximum. minimum, median* dan standar deviasi.

3.4.2. Regresi data panel

Pengujian data panel menggunakan analisis regresi data panel. Adapun model regresi yang digunakan untuk pengambilan kesimpulan sebagai berikut.

$$DAU = \alpha + \beta_1 JP + \beta_2 LW + \beta_3 IPM + \beta_4 IKK + \beta_5 PDRB + \varepsilon$$

Nama		Keterangan
DAU	:	Dana alokasi umum
JP	:	Jumlah penduduk
LW	:	Luas wilayah
IPM	:	Indeks pemerataan penduduk
IKK	:	Indeks Kemahalan Konstruksi
PDRB	:	Produk domestik regional bruto perkapita
α	:	Konstanta
β	:	Koefisien Beta
ε	:	Error

Analasis regresi data panel menggunakan bantuan progam *eviews* dengan uji melakukan uji hipotesis yang meliputi koefisien determinasi, uji F simultan, dan uji t parsial. Sebelum melakukan uji hipotesis menggunakan analisis regresi data panel sebelumnya telah dilakukan uji pemilihan model terlebih dahulu yang terdiri dari uji *Chow*. Uji *Hausmann*, dan uji *Langrange Multiplier*.

3.4.2.1. Koefisien Determinasi

Dalam regresi linear diperlukan uji koefisien determinasi untuk mengetahui besar pengaruh variabel independen terhadap dependen melalui nilai R-Squared (Ghozali, 2006).

3.4.2.2. Uji F Simultan

Menurut Ghozali (2006) uji F simultan digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Apabila nilai F dibawah 0,05

maka variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.

3.4.2.3. Uji t Parsial

Menurut Ghozali (2006) uji t parsial digunakan untuk melihat pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Apablla nilai signifikansi dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.4.3 Uji Korelasi

Uji korelasi digunakan untuk melihat hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Uji korelasi yang digunakan menggunakan *Eviews* 9.0 dengan kesimpulan apabila koefisien korelasi positif maka menunjukan hubungan positif dan apabila koefisien korelasi negatif maka menunjukan hubungan negatif.

3.4.4. Uji Beda (*One Way ANOVA*)

Uji *One Way ANOVA* digunakan untuk melihat perbedaan rata-rata faktor yang terdiri lebih dari 2 faktor. Hasil pengunjian apabila nilai sig variabel memiliki hasil signifikan atau dibawah (0,05) maka dapat disimpulkan terdapat perbedaaan antar faktor sehingga akan diteruskan menggunakan uji *post hoc tukey* untuk melihat detail perbedaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	DAU	JP	LW Darat	LW Laut	IPM	IKK	PDRB
Mean	448,000,000,000	209,396.90	38.30	61.69294	65.20	104.02	26,435.77
Median	426,000,000,000	173,370.00	32.45	67.55	63.93	102.89	20,780.00
Maximum	999,000,000,000	1,141,816.00	97.42	99.24	81.66	159.68	96,338.00
Minimum	123,000,000,000	31,688.00	0.76	2.58	50.30	70.46	6,300.00
Std. Dev.	141,000,000,000	175,307.90	24.13	24.13	5.79	14.63	18,442.78

Sumber: Data diolah (2019)

Pada tabel 1 diketahui bahwa DAU daerah kepulauan memiliki nilai rata-rata sebesar 448.000.000, nilai minimum sebesar 123.000.000.000, nilai maksimum sebesar 999.000.000, dan standar deviasi sebesar 141.000.000.000. Variabel Jumlah Penduduk (JP) memiliki nilai rata-rata sebesar 209.396,90, nilai minimum sebesar 31.688, nilai maksimum sebesar 1.141.816 dengan standar deviasi sebesar 175.307,90. Variabel luas wilayah yang terbagi atas wilayah laut dan wilayah darat menunjukkan bahwa luas wilayah darat memiliki nilai rata-rata sebesar 38,30, nilai minimum sebesar 0,76, nilai maksimum sebesar 97,42 dengan standar deviasi sebesar 24,13. Sedangkan untuk luas wilayah laut memiliki nilai rata-rata sebesar 61,69, nilai minimum sebesar 2,58, nilai maksimum sebesar 99,24 dengan standar deviasi sebesar 24,13. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai rata-rata sebesar 65,20, nilai minimum sebesar 50,30, nilai maksimum sebesar 81,66 dengan standar deviasi sebesar 5,79. Variabel Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) memiliki nilai rata-rata sebesar 104,02, nilai minimum sebesar 70,46, nilai maksimum sebesar 199,68 dengan standar deviasi sebesar 14,63. Variabel PDRB memiliki nilai rata-rata sebesar 24.463,77, nilai minimum sebesar 6.300, nilai maksimum sebesar 96.338 dengan standar deviasi sebesar 18,442.

4.2. Uji Korelasi

Tabel 2 Uji Korelasi

	DAU	JP	LWDarat	LWLaut	IPM	IKK	PDRB
DAU	1.0000	0.6822	0.0496	-0.0499	0.1942	-0.2849	0.0211
JP	0.6822	1.0000	0.1310	-0.1311	0.2111	-0.3965	0.1236
LWDarat	0.0496	0.1310	1.0000	-1.0000	0.1444	-0.2394	0.0251
LWLaut	-0.0499	-0.1311	-1.0000	1.0000	-0.1443	0.2396	-0.0250
IPM	0.1942	0.2111	0.1444	-0.1443	1.0000	-0.0145	0.6023
IKK	0.2849	-0.3965	-0.2394	0.2396	-0.0145	1.0000	0.0732

PDRB	0.0211	0.1236	0.0251	-0.0250	0.6023	0.0732	1.0000

Sumber: Olah Data 2019

Penelitian ini menggunakan pengujian data panel sehingga perlu dilakukan uji estimasi model yaitu dengan uji *Chow* dan uji *Hausmann*. Berdasarkan tabel diatas, variabel independen JP, LW Darat, IPM, IKK dan PDRB memiliki korelasi positif terhadap alokasi DAU. Sedangkan LW Laut memiliki korelasi negatif terhadap DAU. Setelah melalui uji estimasi model yang terdiri dari uji *Chow* dan uji *Hausmann*, dengan hasil terpilih model *fixed effect model* sebagai estimator model yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

Model *Fixed effect model* memerlukan uji asumsi klasik agar terhindar dari bias, sehingga perlu dilakukan uji *Heterokedastisitas*. Pengujian *Heteroskedastisitas* pada penelitian ini menggunakan metode *Glejser*. Berdasarkan uji *Heterokedastidas* model penelitian dinyatakan telah lolos uji asumsi klasik.

4.3. PENGUJIAN HIPOTESIS

Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan pada uji bersama tiga kategori wilayah kepulauan dan uji pada masing-masing kategori wilayah kepulauan sesuai pembagian dari DJPK Kementerian Keuangan RI tahun 2018. Hasil pengujian dapat diketahui sebagai berikut:

4.3.1. Uji bersama untuk semua Kategori Wilayah Kepulauan

Tabel 3 Uji Hipotesis Semua Kategori

Variable	**Coefficient**	**Std. Error**	**t-Statistic**	**Prob.**
Kategori	1.673245	1.245345	1.134134	0.0123
JP	302636.2	33173.43	9.122847	0
LW	-1.57E+09	3.60E+09	-0.43587	0.0032
IPM	1.66E+09	6.99E+08	2.369668	0.0182
IKK	8.79E+08	2.37E+08	3.715993	0.0002
PDRB	5083.388	156692.4	0.032442	0.9741
		Goodness of fit		
R-squared	0.895612		**F-statistic**	24.3645
Adjusted	0.888752		**Prob. F**	0.0000
		ANOVA		
Sig.	0.042*			
DAU	**Kategori 1**	**Kategori 2**	**Kategori 3**	
Kategori 1	1.000	0.331	0.013*	
Kategori 2	0.331	1.000	0.021*	
Kategori 3	0.013*	0.021*	1.000	

Sumber: Olah Data 2019

Berdasarkan tabel 3 uji hipotesis, menunjukkan bahwa PDRB tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi DAU karena memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 atau sebesar 0.9741. Hal ini berarti bahwa variabel PDRB tidak mempengaruhi penerimaan alokasi DAU pada daerah dengan kategori 3 atau wilayah kepulauan bertipe *Terrestrial – Aquatic.* Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh terhadap penerimaan dana transfer dan pertumbuhan ekonomi (Ong (2012), Sanghoon dan Kim (2017) dan Babatunde (2018)). Sedangkan variabel Jumlah penduduk menunjukkan pengaruh signifikan terhadap alokasi DAU di daerah (Hamid (2003) dan Azwardi (2006)). Selanjutnya untuk variabel IPM, dan IKK memiliki hasil signifikan positif, sedangkan LW memiliki signifikan negatif.

Nilai *R Squared* non kepulauan sebesar 0.895 atau 89,5 %. Nilai F dari tabel tersebut menunjukan 0.0000 yang artinya signifikan atau model yang digunakan sudah *fit.* Berdasarkan tabel diatas nilai *sig ANOVA* menunjukan nilai 0.042 dibawah 0.05 (Signifikan) yang artinya terdapat perbedaan rata-rata semua kategori daerah penelitian.

Berdasarkan hasil *post hoc tukey* dapat dilihat bahwa kategori 1 dan 2 tidak memiliki perbedaan DAU karena memiliki nilai sig diatas 0.05 yaitu sebesar 0.331 sedangkan kategori 1 dan 3 memiliki perbedaan DAU karena memiliki nilai sig di bawah 0.05 yaitu sebesar 0.013. Kategori 2 dan 3 juga memiliki perbedaan DAU karena

memiliki nilai sig dibawah 0.05 yaitu sebesar 0.021.

4.3.2. Uji masing-masing Kategori Wilayah Kepulauan

Tabel 4 Uji Hipotesis Kategori 1 (*Aquatic – Terrestrial +BKSDK*)

Variable	**Coefficient**	**Std. Error**	**t-Statistic**	**Prob.**
JP	126766	52430	2.4178	0.0161
LW	-3.22E+10	23700000000	-1.3608	0.0144
IPM	5.16E+10	2480000000	20.7876	0.0000
IKK	7.96E+08	343000000	2.3196	0.0209
PDRB	1.24E+06	337069	3.6658	0.0003
Goodness of fit				
R-squared	0.931318		**F-statistic**	47.991
Adjusted R-squared	0.911912		**Prob. F**	0.0000

Sumber: Olah Data 2019

Tabel 5 Uji Hipotesis Kategori 2 (*Aquatic – Terestrial*)

Variable	**Coefficient**	**Std. Error**	**t-Statistic**	**Prob.**
JP	126766	76352	3.1101	0.0015
LW	-2.22E+10	37600000000	-1.6827	0.0178
IPM	5.11E+10	1450000000	17.946	0.0017
IKK	3.96E+08	3495000000	3.2457	0.0481
PDRB	1.24E+06	337069	4.2365	0.0057
Goodness of fit				
R-squared	0.929871		**F-statistic**	41.895
Adjusted R-squared	0.919239		**Prob. F**	0.0000

Sumber: Olah Data 2019

Tabel 6 Uji Hipotesis Kategori 3 (*Terrestrial – Aquatuc*)

Variable	**Coefficient**	**Std. Error**	**t-Statistic**	**Prob.**
JP	143532	43431	1.4271	0.0462
LW	-3.18E+10	13700000000	-1.5918	0.0117
IPM	5.19E+10	1490000000	18.356	0.0460
IKK	7.65E+08	298000000	1.5478	0.0315
PDRB	1.88E+06	287076	2.5634	0.5667
Goodness of fit				
R-squared	0.94354		**F-statistic**	44.673
Adjusted R-squared	0.94213		**Prob. F**	0.0000

Sumber: Olah Data 2019

Hasil pengujian terhadap ketiga kategori wilayah kepulauan tersebut, maka dapat diketahui nilai koefisien masing-masing kategori. Nilai koefisien untuk kategori I, II, dan III menunjukkan angka signifikan kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mampu mempengaruhi variabel dependen. Dengan hasil tersebut maka model yang digunakan sudah mencakup *goodness of fit* dan bisa dilanjutkan untuk menentukan hipotesis.

Selanjutnya dalam pengujian terhadap koefisisen determinasi, dari tabel di atas dapat diketahui untuk kategori I nilai *R-Squared* sebesar 93%. Hal tersebut memiliki arti bahwa variabel independen yang terpilih mampu mempengaruhi variabel dependen sebesar 93% sisanya 7 % adalah faktor diluar variabel. Ketegori II menunjukkan nilai *R-Squared* sebesar 92%. Hal tersebut memiliki arti bahwa variabel independen yang terpilih mampu mempengaruhi variabel dependen sebesar 92% sisanya 8 % adalah faktor diluar variabel. Sedangkan untuk kategori III nilai *R-Squared* sebesar 94%. Hal tersebut memiliki arti bahwa variabel independen yang terpilih mampu mempengaruhi variabel dependen sebesar 94% sisanya 6% adalah faktor di luar variabel. Nilai *R-Squared* ketiga kateori wilayah kepulauan tersebut menunjukkan pengaruh yang kuat antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Hasil pengujian yang tertera pada tabel 4 dan 5 menunjukkan bahwa seluruh

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan nilai signifikansi di bawah 0.05. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa seluruh variabel kebutuhan fiskal berpengaruh terhadap alokasi DAU yang diterima oleh Pemerintah Daerah (Hamid (2003) dan Azwardi (2006). Hasil berbeda ditunjukkan pada tabel 6 yang merupakan wilayah kepulauan bertipe *Terrestrial – Aquatic*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat satu variabel kebutuhan fiskal yang memiliki nilai signifikansi diatas 0,05 atau sebesar 0.5667 yaitu variabel PDRB, hal ini mengindikasikan bahwa variabel PDRB tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi DAU, yang artinya bahwa nilai PDRB untuk wilayah kepulauan bertipe *Terrestrial – Aquatic* tidak mempengaruhi besaran penerimaan alokasi DAU daerah tersebut. Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa PDRB dapat mempengaruhi besaran penerimaan dana perimbangan daerah termasuk alokasi DAU (Azwardi (2006), Ong (2012), Sanghoon dan Kim (2017) dan Babatunde (2018)).

4.4. PEMBAHASAN

Hasil dari uji semua kategori secara bersama-sama berdasarkan tabel data penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kategori memiliki pengaruh positif terhadap alokasi DAU yang berarti bahwa tiap kategori memiliki perbedaan DAU. Hasil ini menunjukan bahwa DAU wilayah kategori 3 (tipe *Terrestrial – Aquatic*) mendapatkan alokasi DAU yang lebih tinggi.

Jumlah penduduk dari semua kategori memiliki pengaruh signifikan positif terhadap DAU. Hasil ini sesuai dengan penelitian Hamid (2003) yang menunjukan bahwa jumlah penduduk mengalami pergeseran formulasi DAU, sehingga memberi pengaruh positif terhadap DAU. Hasil pengujian dalam penelitian memiliki pengaruh signifikan posiif karena berdasarkan pengolahan data panel menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05, hal ini berarti bahwa jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan kebutuhan masyarakat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Luas wilayah dari semua kategori memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap DAU. Hasil ini sesuai dengan penelitian Ong (2012) yang menunjukan bahwa luas wilayah tidak memiliki relasi khusus dengan operasional DAU dan cenderung kurang diperhatikan oleh pemerintah. Luas wilayah merupakan variabel yang digunakan untuk menentukan ketersediaan sarana dan prasarana suatu wilayah, akan tetapi hasil penelitian memiliki nilai koefisien negatif, yang sehingga dalam penelitian ini menunjukkan luas wilayah belum terlalu berpengaruh dalam penentuan alokasi DAU untuk daerah.

Indeks Pembangunan Manusia dari semua kategori memiliki pegaruh positif terhadap DAU. Hasil ini sesuai dengan (Hamid (2003), Azwardi (2006), dan Ong (2012)) yang menunjukan bahwa indeks pembangunan manusia merupakan faktor penting dalam alokasi DAU, sehingga keberadaanya mampu mempengaruhi tingkat dan kualitas DAU. Indeks pembangunan manusia menunjukkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk yang mendapatkan layanan dasar berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan.

Indeks kemahalan konstruksi semua kategori signifikan berpengarh positif terhadap DAU. Hasil tersebut sesuai dengan (Azwardi, 2006) yang menunjukan bahwa IKK berpengaruh positif terhadap DAU. Hal tersebut dikarenakan kesenjangan pendapatan antar daerah berdampak pada pengalihan sumber daya daerah, sehingga memberikan efek merugikan yang lebih besar terutama bagi daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rendah (Jianghuai dan Bu, 2014). Hasil ini juga memperkuat penelitian Allers dan Vermulen (2016) yang menyatakan bahwa tingkat harga lokal mempegaruhi penerimaan dana transfer ke pemerintah daerah. Indeks Kemahalan konstruksi memiliki pengaruh signifikan dalam alokasi DAU karena merupakan variabel yang berkaitan langsung dengan tingkat kesulitan geografis daerah dan sarana prasarana yang dimiliki oleh daerah.

PDRB di kategori 1 dan 2 memiliki pengaruh signifikan positif, hasil ini sejalan dengan penelitian (Ong, 2012). Hal tersebut dikarenakan perubahan PDRB memiliki pengaruh terhadap DAU. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Lim, Sanghoon dan Kim (2017) yang menunjukan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap DAU. Hal tersebut dikarenakan PDRB perkapita merupakan indikator kondisi ekonomi daerah sebagai efek pengganti sumber dana bertujuan untuk mempertahankan tingkat pegeluaran daerah yang dapat mempengaruhi penerimaan dana transfer pemerintah. Akan tetapi hasil pengujian dalam penelitian menunjukkan hasil yang berbeda, dimana PDRB tidak menunjukkan pengaruh pada alokasi DAU untuk daerah. Hal ini

menunjukkan bahwa PDRB bagi wilayah bertipe *Terrestrial – Aquatic* tidak berpengaruh pada alokasi DAU karena memiliki kecenderunagan tingkat PDRB yang tinggi.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kemahalan Konstruksi memiliki pengaruh positif terhadap DAU. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketiga variabel fiskal tersebut mampu mempengaruhi tingkat penerimaan DAU yang diterima oleh daerah. Sementara itu variabel luas wilayah memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap DAU. Temuan ini mengindikasikan bahwa nilai siginifikan negatif pada variabel tersebut belum mampu mempengaruhi tingkat penerimaan DAU. Hasil tersebut berarti bahwa variabel luas wilayah secara umum berpengaruh terhadap DAU akan tetapi nilai signifikansi tersebut tidak mampu mempengaruhi penerimaan DAU untuk daerah bercirikan kepulauan. Hasil penelitian terhadap variabel PDRB menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan DAU. Nilai PDRB suatu daerah tidak berpengaruh terhadap penerimman DAU, hal tersebut dikarenakan sebagian daerah yang kaya SDA akan tetapi pembangunan manusianya masih rendah, sehingga daerah-daerah tersebut tetap membutuhkan DAU yang besar, begitupun sebaliknya.

Hasil tersebut diperkuat dengan adanya uji beda yang menunjukan bahwa setiap kategori wilayah memiliki perbedaan tingkat DAU, kategori 1 dan 2 tidak memiliki perbedaan namun kategori 1 dan 3 serta kategori 2 dan 3 memiliki perbedaan, hal tersebut dikarenakan daerah kepulauan memiliki perbedaan DAU. Hasil PDRB wilayah 3 memiliki hasil berbeda dengan wilayah 1 dan 2 yaitu tidak berpengaruh terhadap DAU. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebutuhan fiskal berpengaruh terhadap alokasi DAU. Alokasi DAU yang diterima oleh daerah non-kepulauan (*terrestrial – aquatic*) lebih tinggi dari pada daerah bercirikan kepulauan (*aquatic – terrestrial*), hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan alokasi dana perimbangan yang berakibat pada kesenjangan pemerataan desentralisasi fiskal, terutama bagi daerah bercirikan kepulauan.

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum variabel kebutuhan fiskal berpengaruh terhadap tingkat penerimaan DAU untuk setiap daerah. Adapun pembagian kategori wilayah yang terjadi pada daerah kepulauan memberikan dampak pada nilai signifikansi variabel PDRB. Hal tersebut berdampak pula pada tingkat penerimaan DAU pada setiap kategori wilyah terutama pada daerah bercirikan *Terrestrial-Aquatic*. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar evaluasi Pemerintah Daerah bercirikan kepulauan untuk melakukan evaluasi terhadap pengalokasian DAU. Jumlah penduduk, luas wilayah, IKK, IPM, dan PDRB harus diperhatikan oleh pemerintah pada saat merancang dana alokasi umum.

KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain adalah tidak dapat menjangkau daerah pemekaran karena belum memiliki laporan keuangan lengkap dan sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang difokuskan pada data yang terkait dengan variabel penelitian. Penelitian ini hanya sebatas pandangan peneliti terhadap keadaan alokasi DAU di daerah berdasarkan data yang ada, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang serupa dengan implikasi terhadap solusi dan kebijakan pemerintah terkai dengan alokasi DAU. Penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan DAU Indonesia dengan DAU luar negeri sehingga dapat memberikan masukan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk membenahi sistem dalam merancang alokasi DAU bagi pemerintah daerah.

REFERENSI

Aaberge, R & L. Audun, (1997). Fiskal and spending behavior of local governments: an empirical analysis based on norwegian data. Discussion Papers No. 196, Statistics Norway, June 1997.

Adhamaski. (2015). Menggenjot Kinerja Ekonomi Daerah. Diakses pada tanggal 12 Desember 2018 dari http://www.coreindonesia.org/view/147/menggenjot-kinerja-ekonomi-daerah.html.

Alegre, J. (2014). Does fiskal decentralization affect the effectiveness of intergovernmental grants? european regional policy and spanish autonomous regions. *Papers in Regional Science 94*(4): 817-847.

Allers, M. A., & Vermeulen, W. (2016). Capitalization of equalizing grants and the flypaper effect, *Regional Science and Urban Economics 58* (2016) 115–129.

Amril, A., Erfit, E., & Safari, M. (2015). Flypaper effect pada kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif dan Pembangunan Daerah 2*(3): 135-146.

Arikunto, S. (2006). Metode penelitian kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.

Arsyad, L. (1999). Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah. Yogyakarta: BPFE.

Ditjen Bina Keuangan Daerah, (2013). Dana perimbangan, sumber pendapatan daerah terbesar. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2019 dari http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/24-dana-perimbangan--sumber-pendapatan-daerah-terbesar.

Azwardi, (2006). Pengaruh Variabel Kebutuhan Fiskal Terhadap Alokasi DAU di Indonesia *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Hal 107-111.

Babatunde, S. A. (2018). Government spending on infrastructure and economic growth in Nigeria, Economic Research.

Baskaran, T. (2016). Intergovernmental Transfers, Local Fiskal Policy, and the Flypaper Effect: Evidence from a German State. *Public Finance Analysis* vol. 72 No. 1.

Bastian, I. (2003). Sistem akuntansi publik konsep untuk pemerintahan daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Cahyaning, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap alokasi belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating pada pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2015. *E-journal Unair JIET*.

Chan, N. P. (2018). The effectiveness of fiskal policy: contributions from institutions and external debts. *Journal of Asian Business and Economic Studies*.

Cho, L. 2018. "Fiskal decentralization in Korea". Asian Education and Development Studies, Vol. 7 Issue: 3, pp.279-290

United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. (2019). Chronological lists of ratifications of ratifications of, accessions and successions to the convention and the related Agreements. Diakses pada tanggal 24 Februari 2019 dari https://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm.

Frankel, J. P. & Wallen N. E. (2008). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.

Ghozali, I. (2006). Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Guga, E. (2018). Local government modernization in Albania: historical background and the territorial reform 2015 – 2020. *International Journal of Public Sector Management*.

Halim, A. (2002). Seri akuntansi sektor publik-akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Hamid, E. S. (2003). Formula Alternatif Dana Alokasi Umum. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 18*, No. 3, 2003, 225 – 242.

Haryanto, J. T. (2014). Peningkatan kualitas belanja di daerah sudah mendesak. Diakses dari https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/peningkatan-kualitas-belanja-di-daerah-sudah-mendesak.

Hou, Y. (2003). What Stabilizes State General Fund Expenditures in Downturn Years—Budget Stabilization Fund or General Fund Unreserved Undesignated Balance?. *Public Budgeting & Finance*.

Hudspeth N. W., F. M. David, R. F. Dye, & A W. Crosby. (2015). Do Troubled Times Invite Cloudy Budget Reporting? The Determinants of General Fund Expenditure Share in U.S. States. Public Financial Publications, Inc

Inayati, N. I., & Setiawan, D. (2017). Fenomena flypaper effect pada belanja daerah

kabupaten/kota Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.

Iskandar, I. (2012). Flypaper effect pada unconditional grant. *Jurnal Ekonomi Pembangunan 13* (1): 113-131.

Jianghuai, Y. G., & Bu, Z. M. (2014). Rural-urban income gap and agricultural growth in China: An empirical study on the provincial panel data, 1978-2010. *China Agricultural Economic Review*, Vol. 6 Iss 1 pp. 92 - 107

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Kirchnera, M, dan S.V. Wijnbergenb, (2016). Fiskal Deficits, Financial Fragility, and the Effectiveness of Government Policies, *Journal of Monetary Economics.*

Koo, J. & Joon. K.B. (2018), Two faces of decentralization in South Korea. *Asian Education and Development Studies.*

Kuncoro, M. (2010). Dasar-dasar ekonomi pembangunan. Yogyakarta: UPP STIMYKPN.

Lim, S., Sanghoon. L, & Kim, P. (2017). Asymmetry in the fly-paper effect of the national subsidy in Korea. *Journal Of The Asia Pacific Economy 2017*.

Marothia, D. (2010). Decentralisation of natural resource management in India: an institutional perspective. *Indian Journal of Agricultural Economics 65*, no. 1.

Niznansky, V., Milklos, I., & Zarska E. (1998). New system of financing public administration in Slovakia. *M.E.S.A 10.*

Ong, J., (2012). Analisis dampak rencana perubahan formulasi dana alokasi umum: studi kasus provinsi bercirikan kepulauan. FE UI

Osborne, D. and Gaebler, T. (1992), Reinventing government: how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. Addison-Wesley, Reading, MA.

Undang – Undang Nomor 06 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. Jakarta: Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah. Jakarta: Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dan BAKOSURTANAL. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Republik Indonesia.

Saputra, D., Mukhtaruddin, P., & Hasni, Y. (2013). *Flypaper effect on the relationship of general allocation fund, revenue sharing fund, and regional own revenue to infrastructure expenditure in regency/municipality of South Sumatera Province period 2008-2011. Proceedings of Annual Paris Business and Social Science Research Conference.*

Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). Research methods for business Edisi 6 Buku 2. Jakarta: Wiley.

Simatupang, S. R., & Khomsin. (2016). Penentuan batas pengelolaan wilayah laut antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, *JURNAL TEKNIK ITS Vol. 5*, No. 2, (2016) ISSN: 2337-353.

Suryabrata, S. (2000). *Metode penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Swan, J. E. & Martin, W. S. (1994),The Theory Setting Testable Hypothesis Model: A Framework to Assist Doctoral Students in Linking Theory and Empirical Research. *Marketing Education Review, Vol. 4*, pp. 2-15.

United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. (1998). The United Nations Convention on the Law of the Sea (A historical perspective). Diakses pada tanggal 13 September 2018 dari https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm#Historical/20Perspective.